

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memecahkan berbagai persoalan. Partisipasi masyarakat juga sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik di daerah kota maupun pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program dari pemerintah. Keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan suatu program, agar program berjalan dengan baik. Agar pembangunan berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut (Rorong .2017).

Pembangunan desa dapat diartikan sebagai pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimana hal ini merupakan proses peningkatan kemampuan penduduk desa untuk memahami dan menguasai lingkungan sosial yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Salah satu hal penting dalam menunjang pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur. Dalam melaksanakan tujuan pembangunan infrastruktur, maka segala potensi yang ada harus dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan

memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan tercapainya pelaksanaan program pembangunan pedesaan pun harus dilakukan agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan. (Sontang. 2015)

Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Selain partisipasi aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Anggaran pembangunan pedesaan secara khusus dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan dari pemberian ADD adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong pembiayaan program pemerintah desa. Namun kenyataannya, mengandalkan dana desa untuk percepatan pembangunan saja tidak cukup, dan harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. (Mustikawati. 2019)

Melalui partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya). Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah pembangunan di bidang fisik dan sosial. Hal Ini dapat diwujudkan melalui

perbaikan fasilitas infrastruktur yang ada, dimana infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti halnya sarana jembatan, keberadaannya merupakan modernisasi bangsa yang penyediaannya merupakan salah satu aspek penting guna meningkatkan kelancaran produktivitas sektor produksi dan yang tak kalah penting infrastruktur jembatan ini juga dapat berperan sebagai pendukung dalam menciptakan dan meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat dalam beraktivitas (Rosalina, Maya. 2014).

Selain jalan, infrastruktur yang tak kalah penting dalam meningkatkan akses transportasi adalah jembatan. Jembatan merupakan infrastruktur yang memperlancar dalam menyalurkan komoditi pertanian karena komoditi pertanian berkaitan dengan pengangkutan, dimana sifat atau ciri-ciri komoditi pertanian antara lain, mudah rusak, dibutuhkan dalam keadaan segar, dan lain sebagainya, dan hal ini tidak terlepas dari pentingnya jembatan. Berkaitan dengan hal ini, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur jembatan menuju lahan pertanian usaha tani kelapa sawit di Desa Pintu Padang Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Alasan mengapa penelitian ini dilakukan karena masyarakat di Desa Parimburan Dusun Pintu Padang khususnya petani kelapa sawit sering mengeluh kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap infrastruktur menuju lahan pertanian terutama infrastruktur jembatan, maka dari itu dengan adanya penelitian ini dapat membuka kesadaran pemerintah desa terutama kepala desa di daerah penelitian tersebut supaya dapat berperan aktif dalam pemeliharaan dan perawatan jembatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dan penggunaan iuran petani kelapa sawit dalam pembangunan dan perawatan jembatan didaerah penelitian.
2. Bagaimana tingkat partisipasi petani sawit dalam pembangunan, pemeliharaan dan perawatan jembatan didaerah penelitian.
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan, pemeliharaan dan perawatan jembatan di daerah penelitian.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengumpulan dan penggunaan iuran, perawatan jembatan didaerah penelitian.
2. Untuk menganalisis tingkat partisipasi petani sawit dalam pembangunan, pemeliharaan dan perawatan jembatan didaerah penelitian.
3. Untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pembangunan, pemeliharaan dan perawatan jembatan di daerah penelitian

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi petani dalam membangun, memelihara dan merawat jembatan
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan terkait dengan kebijakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan jembatan

3. Sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan jembatan
4. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Pertanian pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UISU.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program pembangunan, hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien (Ardilah. 2014).

2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keuangan Petani

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian dengan pertanggung jawaban atau pelaporan terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi organisasi atau perorangan pada kurun waktu tertentu.

Dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada umumnya terdapat 2 faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yakni faktor internal (faktor dalam) dan faktor eksternal (faktor luar).

- a. Faktor internal (faktor dalam) yaitu faktor yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan. Karakteristik tersebut mencakup umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan atau aktivitas dan kepemilikan tanah.
- b. Faktor eksternal (faktor luar) mencakup semua pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut, antara lain pengurus desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

Faktor karakteristik individu dapat mempengaruhi aktivitas kelompok, mobilitas individu dan kemampuan finansial. Faktor karakteristik masyarakat memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi. Faktor pendidikan dianggap penting karena melalui pendidikan, seseorang akan lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan cepat tanggap terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi. Semakin tinggi pendidikan, ini berarti bahwa peran serta dalam pembangunan juga akan semakin tinggi. (Wijayanti. 2017).

Tingkat pendapatan akan memberi peluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, karena mempengaruhi kemampuan finansial untuk berinvestasi dengan mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya. Begitu juga dengan faktor lama tinggal seseorang dalam lingkungan pemukiman atau status kepemilikan lahan atau hunian akan mempengaruhi seseorang untuk bekerja sama dan terlibat dalam kegiatan bersama, Waktu luang seseorang untuk terlibat dalam organisasi atau kegiatan di masyarakat juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, banyak warga yang disibukkan oleh pekerjaan

utama atau kegiatan sehari – hari sehingga mereka kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan, diskusi atau kegiatan sosial lainnya (Budiharjo & Sujarto, 2019).

Faktor internal juga meliputi kemauan berupa sikap dan motivasi serta kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh individu. Sedangkan faktor eksternal berupa kesempatan yang mendorong individu untuk ikut berpartisipasi dalam program berupa pemberian akses. (Mardikanto & Soebiato, 2017)

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kejadian nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya yaitu:

- a) adanya kesempatan, artinya tercipta suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi
- b) adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut.
- c) adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya. Kemauan dan kemampuan merupakan potensi yang dimiliki oleh pelaku secara individu ataupun kelompok. Sedangkan kesempatan lebih dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan di luar diri pelaku.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Langkah-Langkah Perencanaan Partisipasi Masyarakat

Perencanaan partisipasi adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan didalamnya terdapat proses yang melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung) serta harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa akan berpihak pada rakyat. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan partisipasi yang dapat digambarkan sebagai tangga perencanaan dapat dilihat sebagai berikut:

Langkah – langkah perencanaan antara lain.

1. Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat.
2. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan, dimana data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
3. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan bukan hanya dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan.
4. Rumusan tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.

5. Langkah rinci penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak.
6. Merancang anggaran, disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan.

2.2.2 Pembangunan Desa

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Desa yang merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karena dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan dimaknai sebagai perubahan sosial yang dimaknai sebagai perubahan sosial yang dikehendaki (interested social change). Hasil akhir yang diinginkan dari perubahan tersebut dimaknai visi pembangunan desa. Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga

dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah. Pembangunan itu berarti kepada usaha mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya, dalam hal ini sesuai dengan hakekat pembangunan nasional, ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.(Deviyanti 2017).

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita,2016)

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	Martiana Dwi Rahayu	2018	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lamung.	Menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sinarsari dalam pembangunan infrastruktur cukup baik, karena masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Hal ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan anggota masyarakat mengetahui dan aktif dalam rangkaian kegiatan pada pembangunan infrastruktur. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, diantaranya adanya sosialisasi, kesempatan, dan faktor pemimpin

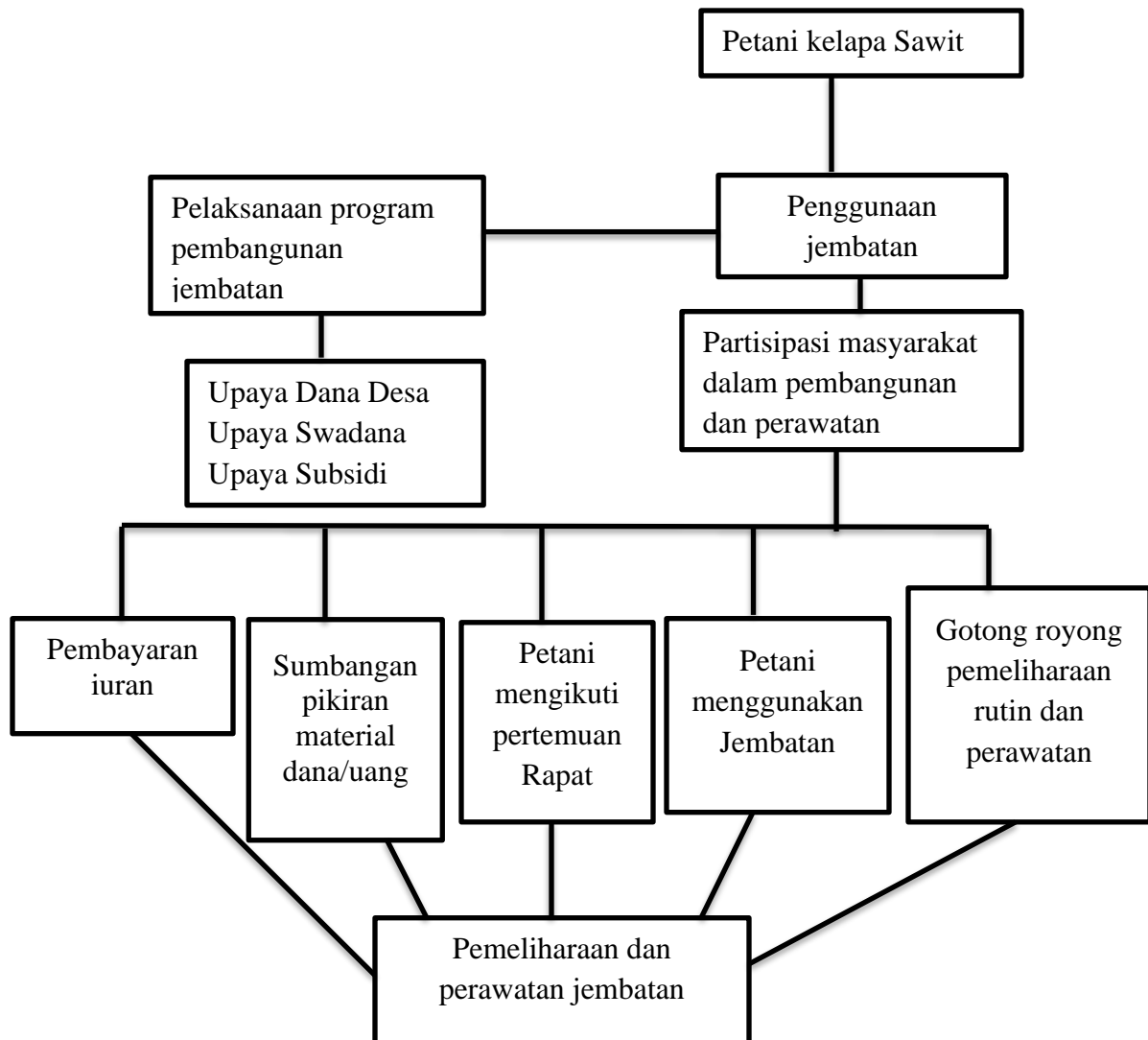
Tabel 1. Lanjutan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
2.	Febry Nur Fauzi	2018	Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Jembatan Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta	Pembangunan infastruktur dari pemerintah desa yang ada pada perencanaan pembangunan Desa Widodomartani tahun 2018 adalah talut irigasi, cor blok, gorong-gorong, rumah-rumah tidak layak huni, gapura batas desa, pengerasan jalan atau pengaspalan jalan dan pembangunan infastruktur yang lain.
3	Andi Ripai	2017	Partisipasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Jembatan Di Kecamatan Bontomane Kabupaten Kepulauan Selayar.	Menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa dalam pembangunan infrastruktur jembatan masih belum memenuhi harapan masyarakat dan tidak optimal, karena program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur jembatan yang masih belum terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

Sumber : Diolah dari Google.com

2.4 Kerangka Pemikiran

Paradigma pembangunan saat ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti dana, tenaga, dan keaktifan waktu serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka menyumbangkan ide bagi kepentingan pembangunan. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memiliki kesempatan karena sibuk oleh kegiatan individu, karena kemampuan finansial yang tidak memadai dan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah maka pembangunan yang sudah direncanakan akan sulit terealisasi. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

———— = Menyatakan Hubungan

————> = Menyatakan Partisipasi